ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : TINDAKAN-TINDAKAN PELANGGARAN HAM DALAM PEMBEBASAN TANAH DI KOTAMADYA SURABAYA
Ketua Peneliti : Muryadi
Anggota Peneliti : Eni Sugiarti
Puji Karyanto
Mochtar Lutfi
Adi Setyawati
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sumber Biaya : DANA RUTIN Universitas Airlangga
SK. Rektor Nomor 6128/J03/PL/1998
Tanggal 24 Agustus 1998

Penelitian ini berusaha mengungkap mengenai tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang terjadi dalam pembebasan tanah di Kotamadya Surabaya.

Masalah-masalah yang diteliti meliputi: (1) Pada kasus-kasus pembebasan tanah manakah yang dalam proses pelaksanaannya disertai dengan tindakan-tindakan pelanggaran HAM; (2) Dalam bentuk apa sajakah pelanggaran itu dilakukan; (3) Bagaimanakah reaksi dari warga yang digusur dalam menghadapi perlakuan yang dirasa melanggar hak asasinya;(4) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kecenderungan pemerintah atau negara melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada pelanggaran HAM dalam proses pembebasan tanah.

Tujuan dari penelitian ini adalah: memaparkan kasus-kasus pembebasan tanah di Kotamadya Surabaya yang dalam pelaksanaannya disertai dengan tindakan-tindakan pelanggaran HAM, memaparkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, dan mendeskripsikan posisi hak-hak dan kedudukan rakyat dalam proses pembebasan tanah.

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah para warga di daerah Kotamadya Surabaya dan sekitarnya yang pernah atau sedang terkena penggusuran dan warga yang tidak terkena penggusuran namun mengetahui permasalahan dan kejadian-kejadian pada saat pelaksanaan penggusuran. Dalam penelitian ini berhasil diwawancarai 12 orang sebagai responden. Pengumpulan datanya dilakukan dengan: (1) mencari data yang dimuat pada surat kabar yang terbit di Surabaya; (2) wawancara dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan dan wawancara bebas namun mendalam; (3) observasi ke lokasi pembebasan tanah dan ke rumah warga pasca penggusuran; (4) dengan studi kepustakaan. Setelah data-data berhasil dikumpulkan kemudian dianalisa secara deskriptif-kualitatif.

Dari hasil temuan dan analisis data, maka kemudian diperoleh beberapa kesimpulan :(1) tidak semua kasus pembebasan tanah yang terjadi di Surabaya disertai dengan tindakan-tindakan pelanggaran HAM; (2) bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam kasus pembebasan tanah diantaranya berupa: tuduhan menghambat pembangunan, ancaman, pemanggilan ke kantor-kantor pemerintah dan keamanan, pemberian stikma PKI, penciptaan kondisi yang tidak aman, pemutusan aliran listrik

warga, mendatangkan aparat keamanan dalam jumlah besar, menghadang warga yang akan unjuk rasa, menakuti warga dengan anjing pelacak dan gas air mata, penculikan dan penahanan,pembuldozeran tanah dan atau bangunan,serta pemukulan dan penyiksaan. (3) reaksi dari warga yang digusur dalam menghadapi tindakan-tindakan yang dirasa melanggar hak asasinya diantaranya berupa: mengadu ke instansi-instansi pemerintah, mengadu ke DPRD/DPRRI, mengadu ke Kotak Pos 5000, minta bantuan LBH, melakukan aksi unjuk rasa, mengadu ke Komnas HAM, melawan aparat yang akan menggusur, dan tidak memilih partai pemerintah dalam pemilu. (4) kasus-kasus pembebasan tanah di Surabaya yang sempat ditangani Komnas HAM jumlahnya masih sangat sedikit. (5) untuk mengetahui kecenderungan pemda dan aparat keamanan sering melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada pelanggaran HAM sebenarnya tidak lepas dari upaya pemda untuk segera menjadikan kota Surabaya sebagai kota metropolis. Untuk itu pemda berusaha menciptakan kondisi-kondisi yang aman dan menguntungkan bagi pemilik modal. Oleh karena itu pihak-pihak yang dirasa akan menghambat tujuan tersebut harus disingkirkan dan kalau perlu dengan paksaan.

KATA PENGANTAR

Penelitian yang berjudul *Tindakan-Tindakan Pelanggaran HAM dalam Pembebasan Tanah di Kotamadya Surabaya* ini, idenya berawal ketika peneliti membaca buku Stanley yang berjudul *Seputar Kedung Ombo*. Dalam buku ini Stanley mengemukakan beberapa tindakan yang dirasa melanggar HAM untuk memaksa warga Kedung Ombo agar mau meninggalkan tanah dan desanya guna kepentingan pembangunan waduk.

Dari sinilah peneliti kemudian bertanya dalam hati, apakah dalam pembebasan tanah yang terjadi di Kotamadya Surabaya juga terjadi tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih bersifat sepihak, dalam arti hanya menggunakan sumber informasi dari warga yang tergusur dan surat kabar, sedang informasi dari pihak yang dituduh melakukan pelanggaran HAM belum berhasil didapat karena berbagai alasan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan juga dapat memancing peneliti-peneliti lain untuk meneliti kasus-kasus ini dengan menggunakan sumber informasi yang berbeda.

Penelitian ini dapat terlaksana tepat pada waktunya, tidak lepas karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah menerbitkan surat